

**PERAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI)
SUMATERA BARAT DALAM MENGADVOKASI
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK PADA
REKLAMASI DANAU SINGKARAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Oleh:

FACHRUL ROZY

1810832006



Pembimbing

Dr. Aidinil Zetra, MA

Dewi Angraini, S.IP, M.Si

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

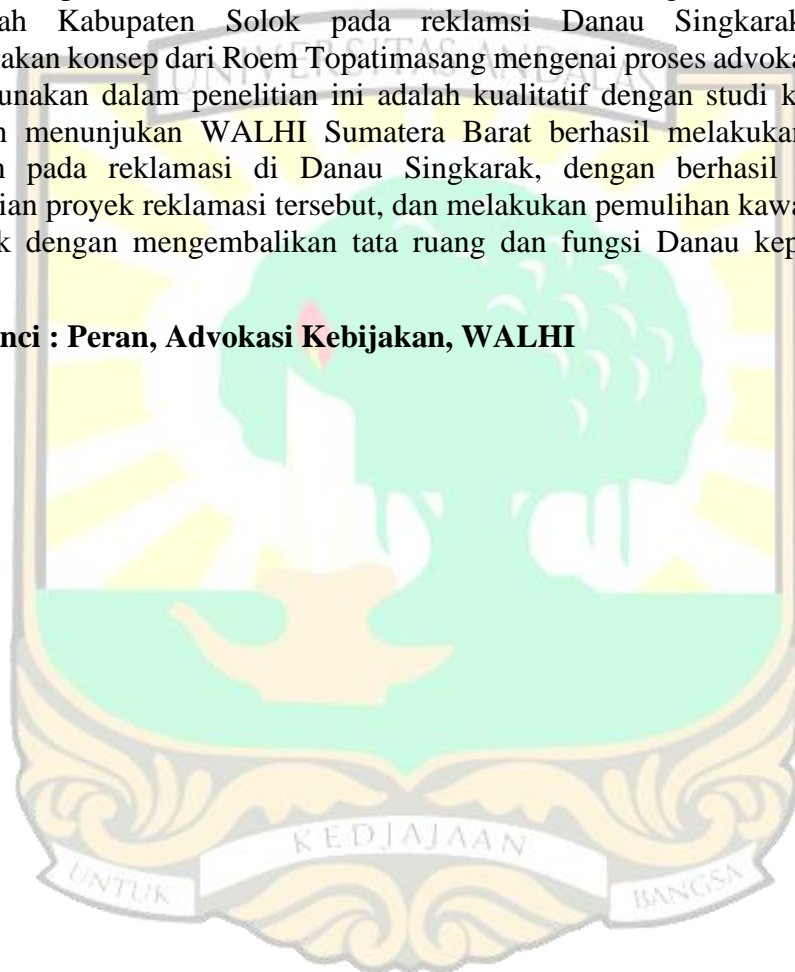
PADANG

2023

ABSTRAK

Kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok pada proyek Reklamasi di Danau Singkarak diduga ilegal, karena adanya indikasi pelanggaran pada Peraturan Presiden No 60 Tahun 2021 Tentang penyelamatan Danau prioritas nasional dan Perda No 1 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Solok 2012 – 2031, yang dilakukan oleh PT Kalukua Indah Permai (KIP) dan CV Anamdar. Proyek reklamasi tersebut dilaporkan oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Sumatera Barat karena tidak memiliki dasar hukum dan perizinan yang jelas. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran WALHI Sumatera Barat dalam mengadvokasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok pada reklamsi Danau Singkarak. Peneliti menggunakan konsep dari Roem Topatimasang mengenai proses advokasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan WALHI Sumatera Barat berhasil melakukan advokasi kebijakan pada reklamasi di Danau Singkarak, dengan berhasil melakukan penghentian proyek reklamasi tersebut, dan melakukan pemulihan kawasan Danau Singkarak dengan mengembalikan tata ruang dan fungsi Danau kepada fungsi awalnya.

Kata Kunci : Peran, Advokasi Kebijakan, WALHI



ABSTRACT

The Solok local government's activities on the reclamation project on Lake Singkarak are allegedly illegal, due to indications of violations of Presidential Regulation No. 60 of 2021 concerning the rescue of national priority lakes and Regional Regulation No. 1 of 2013 concerning the RTRW of Solok Regency 2012 - 2031, which was carried out by PT Kalukua Indah Permai (KIP) and CV Anamdaro. The reclamation project was reported by WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) West Sumatra for not having a clear legal basis and licensing. The purpose of this study is to explain the role of WALHI West Sumatra in advocating the Solok Regional Government's policy on reclamation of Lake Singkarak. Researchers used Roem Topatimasang's concept of the advocacy process. The method used in this research is qualitative with case studies. The results showed that WALHI West Sumatra succeeded in advocating policies on reclamation in Lake Singkarak, by successfully stopping the reclamation project, and restoring the Lake Singkarak area by returning the spatial layout and function of the Lake to its original function.

Keywords: Role, Policy Advocacy, WALHI

